

**IMPLIKASI PEMALSUAN TANDA TANGAN DALAM AKTA KUASA
MENJUAL OLEH NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 39
PK/Pid/2025)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan*



OLEH :

RACKHEL MONICA HELMI

NIM : 2420122022

Dosen pembimbing:

Dr. AZMI FENDRI S.H., M.Kn

Dr. YOSERWAN S.H.,M.H.,LLM

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026**

ABSTRAK

IMPLIKASI PEMALSUAN TANDA TANGAN DALAM AKTA KUASA MENJUAL OLEH NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 39 PK/Pid/2025)

**Rackhel Monica Helmi, 2420122022, Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2026**

Pembimbing: Dr. Azmi Fendri S.H., M.Kn., Dr Yoserwan S.H., M.H., LLM

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Keautentikan akta yang dibuat oleh notaris dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap penandatanganan akta. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Implikasi pemalsuan tanda tangan dalam akta kuasa menjual oleh notaris studi kasus Putusan Nomor 39 PK/Pid/2025; (2) Bagaimana kedudukan hukum Akta Kuasa Menjual yang tanda tangannya dipalsukan oleh notaris studi kasus Putusan Nomor 39 PK/Pid/2025. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Implikasi pemalsuan tanda tangan oleh notaris berdampak pada jabatan notaris yaitu berupa pertanggungjawaban secara Administrasi jika melanggar undang-undang dan mengabaikan prosedur, pertanggungjawaban perdata apabila digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mengganti kerugian, dan notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana. Selain itu implikasi terhadap jabatan notaris berupa tanggung jawab secara etik jika bertentangan dengan Kode Etik Profesi. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 39 PK/PID/2025 mempertimbangkan bahwa pemalsuan tanda tangan oleh notaris terbukti sebagai suatu tindak pidana yaitu Pasal 264 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat; (2) Terhadap akta Akta Kuasa Menjual yang tanda tangan salah satu pihaknya dipalsukan oleh notaris pada kasus Putusan Nomor 39 PK/Pid/2025 adalah dapat dibatalkan, karena syarat subjektif dalam perjanjian pembuatan Akta Kuasa Menjual tersebut tidak terpenuhi dan juga melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (3) UUJN. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mematuhi Kode Etik Notaris, dan penguatan pengaturan dalam UUJN yang berbasis teknologi dengan menggunakan verifikasi biometric serta harmonisasi antara UUJN dengan KUHP agar mengatur lebih lanjut terkait batasan sejauh mana seorang notaris dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Bagi pemerintah agar dapat memaksimalkan pengawasan oleh Majelis Pengawas kepada notaris dengan pemberian apresiasi dan penguatan sarana dan prasarana.

Kata kunci: Pemalsuan Tanda Tangan, Akta Notaris, Akta Kuasa Menjual.

ABSTRACT

IMPLICATIONS OF SIGNATURE FORGERY IN A POWER OF ATTORNEY FOR SALE DRAFTED BY A NOTARY (CASE STUDY OF JUDGMENT NO. 39 PK/Pid/2025)

Rackhel Monica Helmi, 2420122022, Master's Program in Notarial Law, Faculty of Law, Andalas University, 2026

Advisor: Dr. Azmi Fendri S.H., M.Kn., Dr Yoserwan S.H.,M.H.,LLM

A notary is a public official authorized to execute authentic deeds and exercise other powers as stipulated in Article 1(1) of Law No. 2 of 2014 amending Law No. 30 of 2004 on the Office of the Notary. The authenticity of a deed drawn up by a notary may be degraded to a private deed and may be annulled or deemed null and void if there is a violation regarding the signing of the deed. The research questions in this study are: (1) What are the implications of forged signatures in a power of attorney for sale executed by a notary, as illustrated by the case study of Judgment No. 39 PK/Pid/2025; (2) What is the legal status of a Power of Attorney for Sale whose signature was forged by a notary case study: Judgment No. 39 PK/Pid/2025. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case study approach. Data was obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources and then analyzed qualitatively. The results of the study indicate: (1) The implications of signature forgery by a notary affect the notary's position, specifically involving administrative liability if laws are violated and procedures are disregarded, and civil liability if sued by a party who feels aggrieved for compensation for damages, and a notary may also be held criminally liable if the elements of a criminal offense are met. Additionally, the implications for the notary's office include ethical liability if there is a violation of the Code of Professional Ethics. The judge's reasoning in Judgment No. 39 PK/PID/2025 held that the forgery of a signature by a notary was proven to constitute a criminal offense under Article 264(1) of the Criminal Code regarding forgery of documents; (2) The Deed of Power of Attorney for Sale, in which the signature of one of the parties was forged by a notary in Case No. 39 PK/Pid/2025, may be annulled because the subjective requirements for the execution of said Deed of Power of Attorney for Sale were not met and it also violates the provisions of Article 44(3) of the Notary Law. In performing their official duties, notaries must comply with applicable laws and regulations and adhere to the Notary Code of Ethics. Furthermore, the technology-based provisions of the Notary Law should be strengthened through the use of biometric verification, and the Notary Law should be harmonized with the Criminal Code to further regulate the extent to which a notary may be held criminally liable. The government should maximize the Supervisory Council's oversight of notaries by providing recognition and strengthening facilities and infrastructure.

Keywords: Forgery of Signatures, Notarial Deed, Power of Attorney for Sal